

| Penjelasan Agenda dan Materi/Bahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST) PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Perseroan") | | Agenda Description and Materials of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of PT Bank BTPN Syariah Tbk ("Company") |
|--|--|---|
| 1 | <p>Mata Acara 1</p> <p>Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris tahun buku 2020, termasuk namun tidak terbatas pada :</p> <p>a. Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;</p> <p>b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan</p> <p>c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</p> | <p>1st Agenda</p> <p>The Ratification and Approval of the Financial Statement, the Annual Report and the Sustainability Report which have been reviewed by the Board of Commissioners for the financial year of 2020, including but not limited to:</p> <p>a. The Ratification of the Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2020;</p> <p>b. The Report on Supervisory Duty of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the financial year ended on December 31, 2020; and</p> <p>c. The Release and Discharge over the Liabilities (Volledig Acquit et Decharge) for the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board of the Company over the management and supervisory actions which have been performed in and during the financial year ended on December 31, 2020.</p> |
| | <p>Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 66, 67, 68 dan Pasal 69 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007").</p> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk : (i) Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keberlanjutan 2020, (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sidharta Widjaja dan Rekan (an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative), yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 dan (iii) memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.</p> | <p><i>In relation to Article 9 paragraph 4 of the Articles of Association of the Company; Articles 66, 67, 68 and Article 69 of Law number 40 of the year 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law-2007").</i></p> <p><i>Based on the matters mentioned above, the Company will propose to the Meeting to: (i) Approve the Annual Report which has been reviewed by the Board of Commissioners, as well as the Report on the Supervisory Duty of the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board for the financial year ended on December 31, 2020, which is contained in the book of Annual Report of 2020 and the Sustainability Report of 2020, (ii) ratify the Annual Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2020, which has been examined or audited by the Public Accounting Firm (KAP) of Sidharta Widjaja dan Rekan (an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative), which is contained in the book of Annual Report of 2020 and (iii) give full release and discharge over the liabilities (volledig acquit et decharge) to the members of the Board of Directors of the Company serving the offices during the financial year ended on December 31, 2020, regarding the management actions, and to the members of the Board of Commissioners and the members of the Sharia Supervisory Board regarding the supervisory actions which have been performed by them respectively during the financial year ended on December 31, 2020, to the extent that such actions are reflected in the Annual Report, the Sustainability Report and the Financial Statement of the Company for the financial year ended on December 31, 2020, save for the act of fraud, embezzlement and other criminal offenses.</i></p> |
| 2 | <p>Mata Acara 2</p> <p>Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</p> | <p>2nd Agenda</p> <p>The stipulation on the appropriation of the net profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2020;</p> |
| | <p>Sehubungan dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 71 UUPT-2007.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.</p> | <p><i>In relation to Article 24 in conjunction with Article 71 of the Company Law-2007.</i></p> <p><i>Based on the above mentioned matters, the Company will propose to the Meeting to approve the stipulation on the appropriation of the Net Profit of the Company including the determination on the amount of the setting aside of fund for reserves which are resolved by the General Meeting of Shareholders.</i></p> |

| | | |
|-----------------|--|---|
| <p>3</p> | <p>Mata Acara 3</p> <p>Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan</p> | <p>3rd Agenda</p> <p><i>The change of composition of the members of the Board of Directors of the Company;</i></p> |
| | <p>Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 (d) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 94 Jo Pasal 111 UUPJ-2007; Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Pasal 3 Jo Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dwiyono Bayu Winantio sebagai Calon Direktur Perseroan;</p> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk (i) mengangkat kembali Sdr. Dwiyono Bayu Winantio sebagai anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diadakan dalam tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.</p> <p>Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Direksi: Direktur Utama : Hadi Wibowo Direktur : Gatot Adhi Prasetyo Direktur Kepatuhan : Arief Ismail Direktur : Fachmy Achmad Direktur : Dwiyono Bayu Winantio</p> <p>Dewan Komisaris: Komisaris Utama/Independen : Kemal Azis Stamboel Komisaris Independen : Dewie Pelitawati Komisaris : Mahdi Syahbuddin Komisaris : Yenny Lim</p> <p>Dewan Pengawas Syariah: Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin, MA Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhamad Faiz, MA</p> <p>Dengan demikian Rapat menegaskan keputusan yang diambil dalam RUPST 2020 berkenaan dengan Susunan Anggota Direksi Perseroan.</p> <p>(ii) Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.</p> | <p><i>In relation to Article 9 paragraph 4 (d) of the Articles of Association of the Company; Article 94 in conjunction with Article 111 of the Company Law-2007; the Regulation of Bank Indonesia Number 11/33/PBI/2009 regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Public Bank and Sharia Business Unit; Article 3 in conjunction with Article 7 of the Regulation of the Financial Services Authority (“POJK”) Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Issuer or Public Company; the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 39/SEOJK.03/2016 regarding the Assessment on the Capability and Compliance for the Candidate Controlling Shareholders, Candidate Members of the Board of Directors and the Candidate Members of the Board of Commissioners of Bank; the Recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company; and the Official Copy of the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (“OJK”) regarding the Result of the Assessment on the Capability and Compliance of Dwiyono Bayu Winantio as the Candidate Director of the Company;</i></p> <p><i>Based on the matters mentioned above, the Company will propose to the Meeting to (i) reappoint Mr. Dwiyono Bayu Winantio as a member of the Board of Directors provided that the term of office of the relevant individual will be the same as the remaining term of office of the other incumbent members of the Board of Directors, which is up to the closing of the Meeting to be convened in the year 2023, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time before the expiry of his term of office aforesaid.</i></p> <p><i>With the appointment aforesaid, then, the composition of the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company will become as following:</i></p> <p><i>The Board of Directors:</i> President Director : Hadi Wibowo Director : Gatot Adhi Prasetyo Compliance Director : Arief Ismail Director : Fachmy Achmad Director : Dwiyono Bayu Winantio</p> <p><i>The Board of Commissioners:</i> President Commissioner/Independent : Kemal Azis Stamboel Independent Commissioner : Dewie Pelitawati Commissioner : Mahdi Syahbuddin Commissioner : Yenny Lim</p> <p><i>The Sharia Supervisory Board:</i> Chairman of the Sharia Supervisory Board : H. Ikhwan Abidin, MA Member of the Sharia Supervisory Board : H. Muhamad Faiz, MA</p> <p><i>Thus therefore, the Meeting confirms the resolution adopted in the AGMS of the year 2020 in relation to the Composition of the Members of the Board of Directors of the Company.</i></p> <p><i>(ii) Give authority to the Board of Directors, with the right of substitution to take any actions which are required in relation to the third agenda in accordance with the prevailing provisions, including to state it in a separate Notary Deed and to notify the changes to the composition of the members of the Board of Directors of the Company to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as other related institutions in accordance with the prevailing provisions.</i></p> |

| | | |
|-----------------|---|---|
| <p>4</p> | <p>Mata Acara 4</p> <p>Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2021</p> | <p>4th Agenda</p> <p><i>The stipulation regarding the amount of remuneration for the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Sharia Supervisory Board of the Company for the year 2021;</i></p> |
| | <p>Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; Pasal 96 dan Pasal 113 UUPST-2007.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk: (i) memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan (ii) menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dalam menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p> | <p><i>In relation to Article 9 paragraph 4 letter (e) of the Articles of Association of the Company, Article 14 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; Article 17 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company; POJK Number 59/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Good Corporate Governance in the Providing of Remuneration of Sharia Public Bank and Sharia Business Unit; POJK Number 30/POJK.04/2017 regarding the Repurchase of shares issued by Public Company; Article 96 and Article 113 of the Company Law-2007.</i></p> <p><i>Based on the matters mentioned above, the Company will propose to the Meeting, with due observance of the recommendation from the Nomination and Remuneration Committee to: (i) grant full power and authority to the Board of Commissioners of the Company to stipulate the Remuneration for the members of the Board of Directors and the members of the Sharia Supervisory Board for the year 2021 through the Meeting of the Nomination and Remuneration Committee, as well as stipulate the distribution among the members of the Board of Directors and the members of the Sharia Supervisory Board, provided that in stipulating the figure of the total amount as well as the distribution of Remuneration for the members of the Board of Directors and the members of the Sharia Supervisory Board aforesaid, the Board of Commissioners will be obliged to take into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company, and (ii) approve the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee which has been approved by the Board of Commissioners which is stipulating the gross total amount of the Remuneration for the members of the Board of Commissioners for the year 2020 and grant power and authority to the Board of Commissioners to stipulate, in a decree of the Board of Commissioners, the distribution of the total amount of the Remuneration aforesaid among the members of the Board of Commissioners, provided that in stipulating the distribution of the total amount of the Remuneration aforesaid, the Board of Commissioners will be obliged to take into account the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.</i></p> |
| <p>5</p> | <p>Mata Acara 5</p> <p>Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut</p> | <p>5th Agenda</p> <p><i>The Appointment of the Public Accountant (AP) and/or the Public Accounting Firm (KAP) to audit the books of the Company for the financial year ended on December 31, 2021, and the stipulation on the amount of honorarium as well as other requirements in relation to such appointment</i></p> |
| | <p>Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 68 UUPST-2007; Pasal 13 ayat 1 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Rekomendasi Komite Audit Perseroan.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk (i) menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku dan (ii)</p> | <p><i>In relation to Article 9 paragraph 4 letter (f) of the Articles of Association of the Company; Article 68 of the Company Law-2007; Article 13 paragraph 1 of POJK Number 13/POJK.03/2017 regarding the Utilization of the Services of Public Accountant and Public Accounting Firm in the Financial Services Activities; and the Recommendation of the Audit Committee of the Company.</i></p> <p><i>Based on the matters mentioned above, the Company will propose to the Meeting to grant power and authority to the Board of Commissioners to (i) appoint AP and/or KAP who will examine or audit the books and records of the Company for the financial year ended on December 31, 2021, as well as the stipulation on the amount of honorarium and other requirements regarding the appointment of AP and/or KAP aforesaid, with due observance of the recommendation of the Audit Committee and the prevailing</i></p> |

| | | |
|----------|--|---|
| | menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021 termasuk persetujuan penetapan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut | <i>regulations, and (ii) stipulate the substituting AP and/or KAP in the event that AP and/or KAP who have been appointed in accordance with the resolution of the Meeting due to any reason whatsoever, cannot complete/carry out the audit over the financial statement of December 31, 2021, including the approval over the stipulation on the amount of honorarium and other requirements in relation to the appointment of the Substituting KAP and/or AP aforesaid</i> |
| 6 | Mata Acara 6 Laporan Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan; | 6th Agenda Report on the Implementation of Transfer of a Portion of Treasury Shares of the Company |
| | Sehubungan dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan Pasal 30 POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka; Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan menginformasikan kepada Rapat atas Laporan Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi yang bersifat variable melalui Pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021. | <i>In relation to POJK Number 59/POJK.03/2017 dated December 18, 2017, regarding the Implementation of Good Corporate Governance in the Providing of Remuneration for Sharia Public Bank and Sharia Business Unit; and Article 30 of POJK Number 30/POJK.04/2017 dated June 22, 2017, regarding the Repurchase of Shares Issued by Public Company;</i> <i>Based on the matters mentioned above, the Company inform to the Meeting regarding the Report on the Implementation of payment of variable remuneration through the Transfer of a Portion of the Treasury Shares of the Company has been implemented on January 25, 2021.</i> |
| 7 | Mata Acara 7 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan | 7th Agenda The Amendment to the Articles of Association of the Company |
| | Sehubungan dengan Pasal 19 UUPT-2007; POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk (i) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. (ii) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.” | <i>In relation to Article 19 of the Company Law-2007; POJK Number 14/POJK.04/2019 regarding the Amendment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2015 Regarding the Increase of Capital of Public Company by Giving Preemptive Rights; POJK Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Company; and POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Company Electronically.</i> <i>Based on the matters mentioned above, the Company will propose to the Meeting to (i) Approve the amendment to the Articles of Association of the Company in the framework of adjustment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 14/POJK.04/2019 regarding the Amendment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2015 regarding the Increase of Capital of Public Company by Giving Preemptive Rights, POJK Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Company; and POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding the Convening of the General Meeting of Shareholders of Public Company Electronically, (ii) Approve the granting of power of attorney to the Board of Directors with the right of substitution to restate in a notary deed over the resolution mentioned above, including to recompose the entire provisions of the Articles of Association of the Company in the notary deed and, furthermore, to submit application on the notification over the amendment to the Articles of Association of the Company aforesaid to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as announce it in the State Report of the Republic of Indonesia, and for such purpose to make changes and/or addition in any form whatsoever which are required and/or prescribed by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in order to be able to be approved with regard to the relevant amendment to the Articles of Association and to take any and all actions which are required by the prevailing statutory regulations.”</i> |